

BAB IV KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan kita dapat ditarik kesimpulan bahwa advokasi yang telah dilakukan oleh Amnesty International sebagai aktor transnasional sesuai dengan konsep TAN dari Keck dan Sikkink. Pola *boomerang pattern* yang terdapat dalam buku *Activist Beyond Borders* pun sesuai dengan pola interaksi antar aktor yang terjadi dalam isu pelanggaran HAM akibat kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Pola bumerang tersebut dapat dilihat dari PAHRA sebagai NGO lokal yang diblokade oleh pemerintah Filipina sehingga meminta bantuan kepada Amnesty International untuk membantu mengangkat isu ini ke ranah internasional sekaligus juga menekan langsung pemerintah Filipina. Namun, Amnesty International juga menyadari bahwa tujuan advokasi akan lebih sulit apabila tidak ada bantuan dari aktor yang lebih kuat dalam menekan pemerintah Filipina, sehingga Amnesty International pun mempengaruhi negara-negara dan juga organisasi internasional untuk membantu mendesak pemerintah Filipina.

Dalam melakukan strateginya, Amnesty International menggunakan keempat strategi sesuai dengan konsep TAN, yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. *Information politics* dan *symbolic politics* digunakan Amnesty International untuk mengangkat isu dan menarik perhatian publik mengenai pelanggaran HAM di Filipina melalui publikasi laporan tahunan, berita-berita terkait kebijakan *War on Drugs*, dan juga kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Amnesty International. Amnesty International menggunakan *leverage politics* untuk menekan pemerintah Filipina terkait pelanggaran HAM yang terus terjadi melalui aktor yang lebih kuat pengaruhnya. Sedangkan *accountability politics* digunakan Amnesty International untuk menekan secara langsung pemerintah Filipina terkait komitmennya dalam hukum internasional dan apa yang telah diratifikasi Filipina, yakni UDHR dan ICCPR. Dari keempat strategi tersebut, selama tahun 2017 hingga 2022 Amnesty International lebih sering menggunakan strategi *information politics* dan *leverage politics*. Strategi

tersebut ditujukan sebagai upaya AI untuk menempatkan isu di pelanggaran HAM di Filipina menjadi isu prioritas internasional yang harus diselesaikan. Selain itu penggunaan strategi tersebut juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan pemerintah Filipina.

Berdasarkan lima tahapan pengaruh dari strategi yang terdapat dalam konsep TAN, yakni pembentukan isu dan penetapan perhatian atau agenda; pengaruh terhadap posisi diskursif negara serta organisasi regional dan internasional; pengaruh terhadap prosedur kelembagaan; pengaruh terhadap perubahan kebijakan pada aktor yang menjadi sasaran; serta pengaruh terhadap perilaku negara, pengaruh yang terjadi dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Amnesty International telah mencapai pada tahap tiga, yaitu adanya perubahan prosedural kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana strategi Amnesty International menekan PBB untuk mengambil sikap atas apa yang terjadi di Filipina. Sedangkan untuk tahap keempat dan kelima yakni mengenai pengaruh terhadap perubahan kebijakan pada aktor yang menjadi sasaran dan pengaruh terhadap perilaku negara belum tercapai. Meskipun kecaman dari PBB dan sanksi dari AS sudah dilakukan kepada Filipina, namun hal tersebut tidak menghentikan pemerintah Filipina dalam melakukan pelanggaran HAM melalui kebijakan *War on Drugs*.

Hal-hal yang menyebabkan mengapa pemerintah Filipina tidak mengubah kebijakan dan perilakunya yakni karena pemerintah Filipina tidak merasa bahwa perilakunya telah melanggar HAM. Kemudian presiden Duterte-pun anti kritik dari dunia internasional sehingga ia tidak peduli dengan kritik yang ada dan tetap melanjutkan kebijakannya, bahkan pemerintah Filipina juga tidak segan untuk mengambil risiko seperti berani keluar dari ICC dan juga berani tidak disukai oleh AS dan Uni Eropa. Dibalik itu semua, memang masih ada negara-negara yang mendukung Filipina seperti Tiongkok yang dari awal mendukung pemerintah Filipina menerapkan kebijakan *War on Drugs* dan tidak berusaha mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan. Bahkan, AS yang mengecam dan memberikan sanksi kepada Filipina pun masih tetap melakukan beberapa hal yang sebenarnya hal tersebut dapat mudah disalahgunakan, yaitu melakukan transfer senjata ke Filipina.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis. Saran yang pertama untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik mengenai pelanggaran HAM terkait *War on Drugs* diharapkan dapat memberikan kebaruan karena penelitian ini hanya terbatas pada periode presiden Duterte yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Peneliti selanjutnya dapat meneliti bagaimana perkembangan implementasi kebijakan *War on Drugs* pada era kepemimpinan Filipina selanjutnya yakni era kepemimpinan presiden Ferdinand Marcos Jr. Saran selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sumber data primer agar data yang didapatkan dapat lebih kredibel dibandingkan dibandingkan dengan hanya sumber data sekunder melalui studi kepustakaan seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

